

## PROSEDUR PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH

Sirri Shofiani<sup>1</sup>

[sirrishofiani44@gmail.com](mailto:sirrishofiani44@gmail.com)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Adhitya Bayu Suryantara<sup>2</sup>

[adhityabayus@unram.ac.id](mailto:adhityabayus@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dengan tujuan untuk memahami prosedur penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta kontribusinya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penerapan GCG menjadi hal yang penting bagi perusahaan penjaminan berbasis syariah karena berpengaruh pada kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta kepercayaan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan menjadi landasan dalam menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional. Metode pelaksanaan magang meliputi observasi langsung, dokumentasi, serta keterlibatan dalam kegiatan operasional, khususnya pada Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Kegiatan yang dilakukan mencakup verifikasi kas harian, penginputan dokumen klaim, pengarsipan, serta pemahaman terhadap mekanisme audit dan tata kelola perusahaan. Hasil magang menunjukkan bahwa PT. Jamkrida NTB Syariah telah menerapkan prinsip GCG secara konsisten melalui pedoman tata kelola, struktur pengawasan yang jelas, serta proses audit internal yang transparan. Secara keseluruhan, penerapan GCG terbukti mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan memperkuat integritas perusahaan.

**Kata Kunci:** Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Keuangan

### ABSTRACT

*This internship was conducted at PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) with the aim of understanding the procedures for implementing Good Corporate Governance (GCG) and its contribution to increasing transparency and accountability in financial reporting. The implementation of GCG is crucial for sharia-based guarantee companies because it influences the quality of governance, regulatory compliance, and stakeholder trust. The principles of GCG, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, are the foundation for creating professional company management. The internship method included direct observation, documentation, and involvement in operational activities, particularly in the Internal Audit Work Unit Division. Activities carried out included daily cash verification, inputting claim documents, archiving, and understanding the audit mechanism and corporate governance. The internship results showed that PT. Jamkrida NTB Syariah*

*has consistently implemented GCG principles through governance guidelines, a clear supervisory structure, and a transparent internal audit process. Overall, the implementation of GCG has been proven to support the improvement of financial reporting quality and strengthen company integrity.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Financial Reporting*

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi aspek penting bagi setiap entitas usaha, khususnya perusahaan jasa keuangan. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* diyakini mampu meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menciptakan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*). Bagi perusahaan jasa keuangan, urgensi penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi lebih tinggi karena kegiatan operasionalnya berkaitan erat dengan pengelolaan dana, risiko, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan harus disajikan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepercayaan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat luas terus terjaga. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus melindungi kepentingan *stakeholders*. Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKKG)* juga telah menerbitkan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai acuan bagi perusahaan. Oleh karena itu, implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* bukan hanya tuntutan moral, melainkan juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh setiap entitas usaha, termasuk lembaga keuangan berbasis syariah.

PT. Jamkrida NTB Syariah Perseroda merupakan lembaga penjamin kredit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberian penjaminan kredit, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebagai perusahaan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik sekaligus profitabilitas, Jamkrida NTB Syariah dituntut untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal ini tercermin terutama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan mitra usaha dan masyarakat.

Dalam konteks perusahaan penjaminan seperti PT. Jamkrida NTB Syariah, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki peranan penting dalam memastikan keberlangsungan usaha, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek fundamental dalam pelaporan keuangan, karena laporan keuangan bukan hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sangat diperlukan guna mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di Jamkrida NTB Syariah Perseroda juga selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti amanah, keadilan, dan keterbukaan, yang merupakan prinsip utama dalam menjalankan usaha berdasarkan maqashid syariah. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance (GCG)* tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengelolaan perusahaan modern, melainkan juga sebagai bagian dari penerapan etika bisnis syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dikaji bagaimana prosedur penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Jamkrida NTB Syariah Perseroda dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, sebagai kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan tata kelola perusahaan, maupun secara praktis, sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan dalam memperkuat penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di masa mendatang.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Menurut (Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)) Pada (Nurjanah & Handayani, 2023), *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Sementara itu, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) pada (Linu et al., 2024), *Good Corporate Governance (GCG)* bertujuan untuk mendorong terciptanya proses pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Menurut (Nurjanah & Handayani, 2023) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. *Transparansi (Transparency)*: *Transparansi* dapat dipahami sebagai keterbukaan dalam penyampaian informasi, baik terkait proses pengambilan keputusan maupun informasi penting dan relevan mengenai aktivitas perusahaan. Penerapan *transparansi* dalam prinsip-prinsip *GCG* memberikan manfaat melalui pengalaman dan pembelajaran dari praktik pelaksanaannya.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*: *Akuntabilitas* merupakan kejelasan atas fungsi, struktur, sistem, serta tanggung jawab dalam organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Ketika *akuntabilitas* diterapkan dengan baik, maka pembagian fungsi, hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara RUPS, Direksi, serta Dewan Komisaris menjadi lebih terstruktur. Kejelasan ini membantu perusahaan menghindari permasalahan yang berkaitan dengan hubungan keagenan.
- c. *Responsibilitas (Responsibility)*: *Tanggung jawab* perusahaan berarti menjalankan pengelolaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup regulasi terkait perpajakan, hubungan industrial, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, standar pengupahan, serta praktik persaingan usaha yang adil.
- d. *Independensi (Independency)*: *Independensi* merupakan salah satu prinsip utama dalam penerapan *GCG* di Indonesia. *Independensi* atau kemandirian mengacu pada keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan maupun

campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

- e. Kesetaraan dan Keadilan (*Fairness*): Secara sederhana, prinsip kesetaraan dan keadilan dapat diartikan sebagai pemberian perlakuan yang adil dan proporsional terhadap pemangku kepentingan sesuai dengan hak-hak yang muncul berdasarkan kontrak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Menurut (Edo, 2014), transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin bahwa perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan secara mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

Tujuan transparansi menurut Warren Bennis pada adalah:

- a. Menciptakan keterbukaan kepada publik dalam setiap program maupun kegiatan yang dijalankan
- b. Memperoleh informasi
- c. Memperkuat tingkat kepercayaan serta kolaborasi antara pihak pengelola dan para pemangku kepentingan.

Menurut Sulistyawati et al., 2024, manfaat transparansi antara lain:

- a. Dapat menumbuhkan kepercayaan para *stakeholder* dan meningkatkan reputasi perusahaan.
- b. Meminimalkan potensi risiko dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Mendorong pertumbuhan dan aktivitas investasi.

Transparansi sangat berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Menurut (Ayu, n.d.) ketepatan waktu dapat menentukan transparansi laporan keuangan. Apabila perusahaan terlambat untuk mempublikasikan laporan keuangannya, besar kemungkinan transparansi dari laporan tersebut tidak akan baik. Hal ini diperkuat oleh (Giri & Supadmi, 2020), tingkat transparansi mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, ketika semakin tinggi transparansi laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu atau entitas dalam suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan, tindakan, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mardiasmo (2009) pada (Halyb, 2019), akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Adapun tujuan akuntabilitas antara lain:

- a. Menjamin bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan *stakeholder*.
- c. Memastikan setiap tindakan organisasi memiliki dasar hukum, etika, dan prinsip profesionalitas.

Akuntabilitas erat kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan. Menurut (Porta et al., 1998), laporan keuangan yang akuntabel menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

### **Standar Operating Procedure (SOP) Good Corporate Governance (GCG)**

1. Transparansi

Transparansi merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Dalam Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /Pojk.05/2017, 2017 dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala.
- b. Memberikan akses informasi yang memadai kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pentingnya kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara organ perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. POJK mewajibkan perusahaan untuk menetapkan struktur organisasi yang jelas dan terdokumentasi dalam kebijakan tertulis untuk memastikan pertanggungjawaban manajemen berjalan secara terukur (Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /Pojk.05/2017, 2017). Menurut (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, 2021) akuntabilitas diperlukan untuk memastikan setiap keputusan manajemen dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

## 3. Pengendalian Internal dan Audit Internal

Perusahaan wajib menerapkan sistem pengendalian internal sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. POJK menegaskan bahwa perusahaan wajib memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertugas melakukan audit rutin, menilai kepatuhan SOP, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan Komisaris (Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /Pojk.05/2017, 2017). Dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, 2021, audit internal juga disebut sebagai mekanisme inti untuk menjamin keandalan laporan keuangan serta efektivitas pengendalian internal perusahaan.

## 4. Independensi

Independensi berarti setiap organ perusahaan harus menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa adanya konflik kepentingan. POJK menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada objektivitas dan profesionalisme, termasuk independensi auditor internal dan eksternal (Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /Pojk.05/2017, 2017). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, 2021 menegaskan bahwa independensi merupakan prinsip kunci agar proses audit dan pengawasan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

## 5. Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*) mengharuskan perusahaan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan dengan setara dan adil. POJK menekankan bahwa perlakuan adil harus dijamin, baik kepada pemegang saham, nasabah, mitra usaha, maupun karyawan (Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /Pojk.05/2017, 2017). Dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, 2021 disebutkan bahwa penerapan prinsip kewajaran mencegah diskriminasi dan memastikan semua *stakeholder* mendapat haknya secara proporsional.

## 6. Pelaporan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahunan

POJK mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan *Good Corporate Governance (GCG)* secara tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola. Laporan ini mencakup struktur organisasi, pelaksanaan audit, rapat organ perusahaan, serta evaluasi kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* (Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /Pojk.05/2017, 2017). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, 2021 menekankan bahwa pelaporan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan sarana keterbukaan dan pertanggungjawaban atas tata kelola yang telah diterapkan dalam satu periode berjalan.

## **METODE**

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Pelaksanaan magang ini dimulai pada tanggal 03 September sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan. Selama masa magang, penulis mengikuti kegiatan harian sesuai jam kerja yang berlaku di lingkungan PT. Jamkrida NTB Syariah yaitu pada hariis senin sampai kamis pukul 08.00 – 17.00 WITA dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.30 WITA, sedangkan pada hari jumat pukul 7.45 – 17.00 WITA dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 14.00 WITA.

Selama pelaksanaan magang, kegiatan utama penulis berfokus pada proses operasional yang berkaitan langsung dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Penulis terlibat dalam verifikasi kas harian, penginputan dan pengarsipan dokumen klaim, penyusunan serta pemeriksaan dokumen audit, hingga pemantauan pengendalian internal pada Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana prosedur *GCG* diterapkan dalam praktik tata kelola perusahaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didirikan untuk memberikan kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penjaminan pembiayaan berbasis syariah. Perusahaan ini beroperasi dengan tujuan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam konteks mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang sulit memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan memberikan jaminan syariah, PT. Jamkrida NTB Syariah membantu mengurangi risiko kredit bagi lembaga keuangan, sehingga mereka lebih siap memberikan pinjaman kepada sektor-sektor yang membutuhkan, terutama UMKM. PT. Jamkrida NTB Syariah memiliki komite-komite yang fokus pada berbagai bidang, seperti komite penjaminan, komite klaim, komite investasi, dan komite pemantau risiko, yang semuanya berperan dalam menjaga kelancaran dan keberhasilan operasional perusahaan. Produk yang dijalankan oleh PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 yaitu Kafalah Pembiayaan Produktif, Kafalah Pembiayaan Non Produktif dan Surety Bond.

a. Komitmen Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan *GCG* secara konsisten dan berkelanjutan di dalam perusahaan.

b. Frekuensi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tigabelas) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

**Tabel 1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

No.	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance	Keterangan
		Luring Offline	Daring Online		
1	Komisaris Utama	13	-	100%	Termasuk Rapat Evaluasi
2	Komisaris Independen	9	-	100%	Dimulai saat mulai menjabat sebagai Komisaris Independen (6 Juni 2024)

2. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (Sembilan belas) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

**Tabel 2. Frekuensi Rapat Direksi**

No.	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Direktur Utama	14	-	100%
2	Direktur	14	-	100%

3. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

**Tabel 3. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah**

No.	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Ketua Dewan Pengawas Syariah	5	-	100%
2	Anggota Dewan Pengawas Syariah	4	1	100%

c. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris

1. Komite Audit

Selama tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

**Tabel 4. Frekuensi Rapat Komite Audit**

No.	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>		% Kehadiran <i>Attendance</i>	Keterangan
		Luring <i>Offline</i>	Daring <i>Online</i>		
1	Komisaris Utama	6	-	100%	Ketua Komite Audit PT. Jamkrida NTB Bersaing (Januari-Juni 2024)
2	Komisaris Independen	6	-	100%	Ketua Komite Audit Jamkrida NTB Syariah (Juni- Desember 2024)
3	Anggota Komite	10	-	100%	-
4	Anggota Komite	6	-	100%	Anggota Komite Audit PT. Jamkrida NTB Syariah.

2. Komite Nominasi & Remunerasi

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (Dua) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

**Tabel 5. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

No.	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>		% Kehadiran <i>Attendance</i>
		Luring <i>Offline</i>	Daring <i>Online</i>	
1	Komisaris Independen	2	-	100%
2	Anggota Komite	2	-	100%
3	Anggota Komite	-	2	100%

d. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi

PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) pada tahun 2024 memiliki beberapa komite yang berada dibawah naungan Direksi diantaranya komite Investasi dan Komite Penjaminan/Kafalah.

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 06/KD-JNB/III/2022 tentang pembentukan komite Investasi PT. Jamkrida NTB Bersaing (Belum ada SK Direksi Terbaru). PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) memiliki Susunan sebagai berikut:

**Tabel 6. Susunan Komite Investasi**

No	Jabatan	Bagian
1	Direktur	Ketua
2	Plt. Kabag. Keuangan	Sekretaris
3	Kabag. Penjaminan/Kafalah	Anggota
4	Kabag. SDI dan UMUM	Anggota
5	Staff Keuangan dan Investasi	Anggota

2. Komite Penjaminan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 040/KD-JNS/X/2024 tentang Pembentukan Komite Penjaminan/Kafalah PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Adapun susunan Komite Penjaminan sebagai Berikut:

**Tabel 7. Susunan Komite Penjaminan**

No	Jabatan	Bagian
1	Direktur Utama	Ketua
2	Direktur	Wakil Ketua
3	Kabag. Kafalah dan Pemasaran	Anggota
4	Kabag. Manrisk, Klaim dan Subrogasi	Anggota

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Dan Auditor Eksternal Dalam Akuntabilitas Laporan Keuangan

1. Fungsi Kepatuhan

- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Direktur Utama
- Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Satuan Kerja Audit Internal
- Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

2. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

**Tabel 8. Daftar KAP Selama 4 Tahun**

No.	Kantor Akuntan Publik	Tahun Buku	Nama Akuntan Perorangan dan Nomor Pendaftaran OJK
1	KAP HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH	2021	Alamsyah M. Tahir, CPA/ 5.32/KM.1/2018
2	KAP. JOHAN MALONDA MUSTIKA	2022	I Wayan Dhana, DRS, AK, MM, CA, CPA/ 178/NB.122/STTD-AP/2016
3	KAP. DWI HARYADI NUGRAHA DAN REKAN	2023	Dwi Haryadi Nugraha SST, MSi, Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPA STTD.KAP/01/PM.021/2024
4	KAP. DWI HARYADI NUGRAHA DAN REKAN	2024	Dwi Haryadi Nugraha SST, MSi, Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPA STTD.KAP/01/PM.021/2024

f. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perusahaan

PT. Jamkrida NTB Syariah telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut: Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, Laporan Good Corporate Governance Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia pada website [www.jamkridantb.com](http://www.jamkridantb.com) dan [www.jamkridantbsyariah.co.id](http://www.jamkridantbsyariah.co.id), Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada [www.jamkridantb.com](http://www.jamkridantb.com) dan [www.jamkridantbsyariah.co.id](http://www.jamkridantbsyariah.co.id), website Laporan Keuangan Audited telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia pada website [www.jamkridantb.com](http://www.jamkridantb.com) dan [www.jamkridantbsyariah.co.id](http://www.jamkridantbsyariah.co.id)

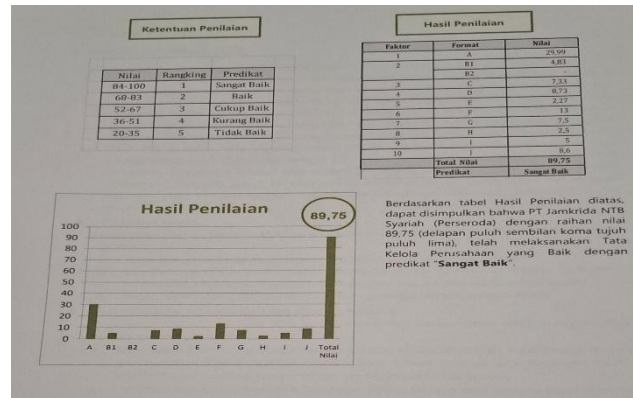
g. Penilaian Secara Mandiri Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
 Untuk periode 2024, PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

**PENILAIAN SECARA MANDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Untuk periode 2024, PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Faktor	INDIKATOR Urutan	Bobot (%)	PENILAIAN 2024
A	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35,00	29,99
B	Ketengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing.	5,00	4,83
C	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	7,33
D	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10,00	8,73
E	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	2,27
F	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	13
G	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7,50	7,5
H	Pengungkapan kepemilikan saham.	2,50	2,5
I	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.	5,00	5
J	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10,00	8,6
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	<b>89,75</b>
<b>PREDIKAT</b>		<b>SANGAT BAIK</b>	

**Gambar 1. Indikator Penilaian**



**Gambar 2. Hasil Penilaian**

Berdasarkan gambar Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dengan raihian nilai 89,75 (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh lima), telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Sangat Baik".

h. Ikhtisar *Good Corporate Governance (GCG)* (SOP dengan Praktek)

**Tabel 9. Ikhtisar SOP dengan Praktek GCG**

<b>Komponen Standard Operating Procedure (SOP)</b>	<b>Standard Operating Procedure (SOP)</b>	<b>Praktek</b>	<b>Sesuai/Tidak</b>	<b>Ket.</b>
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan wajib memberikan informasi akurat, lengkap, dan tepat waktu</li> <li>▪ Laporan keuangan harus terbuka kepada <i>stakeholder</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan telah menyediakan informasi yang relevan melalui penyajian laporan keuangan dan dokumen operasional secara lengkap dan dapat diakses oleh unit terkait.</li> <li>▪ Seluruh data dan dokumen internal dikelola secara tertib sehingga mendukung keterbukaan informasi secara internal sesuai prinsip yang berlaku.</li> </ul>	Sesuai	
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembagian tugas jelas</li> <li>▪ Setiap tindakan perusahaan memiliki pertanggungjawaban dan laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap unit kerja telah tersusun dengan baik</li> <li>▪ Setiap bagian melaksanakan tugas sesuai pedoman kerja internal dan bertanggungjawab kepada atasan sesuai garis koordinasi.</li> </ul>	Sesuai	
Pengendalian Internal dan Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem pengendalian internal wajib diterapkan</li> <li>▪ Dokumen perusahaan harus diperiksa dan dikendalikan.</li> <li>▪ Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) wajib melakukan audit rutin, membuat laporan audit, dan menindaklanjuti hasil audit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan telah menjalankan sistem pengawasan berlapis melalui fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang bertugas melakukan audit rutin terhadap dokumen operasional dan laporan keuangan.</li> <li>▪ Pengelolaan dokumen audit dilakukan secara terstruktur dan dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai bentuk evaluasi serta penguatan pengendalian internal.</li> </ul>	Sesuai	
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan harus bebas konflik kepentingan</li> <li>▪ Auditor harus independen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. Jamkrida NTB Syariah menjalankan pengambilan keputusan secara profesional tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu.</li> <li>▪ Seluruh proses pemeriksaan, penilaian, dan audit</li> </ul>	Sesuai	

		dilakukan secara objektif sesuai standar operasional yang berlaku.		
Kewajaran ( <i>Fairness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan wajib memperlakukan semua <i>stakeholder</i> secara adil.</li> <li>▪ Proses kerja tidak diskriminatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>▪ Proses administrasi, pelayanan, dan pengelolaan, dilakukan tanpa diskriminasi, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa hak seluruh pihak terpenuhi secara adil.</li> </ul>	Sesuai	

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Jamkrida NTB Syariah menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang diterapkan yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, telah memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Pengungkapan kondisi keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah, pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi kinerja kepada pemegang saham dan masyarakat.

Audit internal berfungsi memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif, menilai kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sedangkan audit eksternal memberikan penilaian independen terhadap kewajaran laporan keuangan, sehingga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemegang saham, investor, dan publik.

Secara keseluruhan, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang disertai pengawasan audit internal dan eksternal mampu menjamin keandalan laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam pemberdayaan UMKM berbasis syariah.

Saran untuk PT. Jamkrida NTB Syariah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah. Program pelatihan dan sertifikasi tata kelola dapat dilakukan secara berkala untuk mendukung profesionalitas. Peran audit internal diharapkan lebih proaktif dalam memberikan *early warning* terhadap potensi risiko dan ketidaksesuaian prosedur. Selain itu, laporan hasil audit internal sebaiknya dipublikasikan secara terbatas kepada organ pengawas untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Budaya tata kelola yang baik perlu ditanamkan pada seluruh jenjang organisasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kode etik perusahaan, sosialisasi nilai-nilai *Good Corporate Governance (GCG)*, serta penerapan *reward and punishment* yang konsisten.

Dengan implementasi saran tersebut, diharapkan Jamkrida NTB Syariah dapat semakin memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan, dan memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berlandaskan prinsip syariah.

## REFERENSI

- Ayu, M. (n.d.). *Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Volume perdagangan Saham Dan Return Saham studi Empiris Pada Perusahaan Lq-45 Di Bei*. 1–29. Retrieved November 16, 2025, from [https://media.neliti.com/media/publications/95873-ID-pengaruh-kualitas-pengungkapan-informasi.pdf#:~:text=kualitas%2C ketepatan waktu juga menentukan transparansi laporan,transparansi dari laporan tersebut tidak akan baik](https://media.neliti.com/media/publications/95873-ID-pengaruh-kualitas-pengungkapan-informasi.pdf#:~:text=kualitas%2C%20ketepatan%20waktu%20juga%20menentukan%20transparansi%20laporan,transparansi%20dari%20laporan%20tersebut%20tidak%20akan%20baik).
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA. (n.d.). Retrieved November 16, 2025, from [http://repository.itbwigalumajang.ac.id/700/3/Bab\\_2\\_watermark.pdf#:~:text=Sedangkan menurut Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan,dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/700/3/Bab_2_watermark.pdf#:~:text=Sedangkan%20menurut%20Warren%20Bennis%20mengemukakan%20bahwa%20tujuan,dan%20kerjasama%20antara%20pengelolaan%20dan%20pemangku%20kepentingan).
- Edo, N. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pratama Pionir Sentosa. *Agora*, 2(2). <https://media.neliti.com/media/publications/35898-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-pada-pt-pratama-pionir-sento.pdf>
- Giri, G. R. H. P., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Penerapan Prinsip GCG pada Persepsi Kualitas Informasi Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sewaka Darma. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 293–306. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p02>
- Halyb, A. F. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe*. <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/download/123/35/394>
- Linu, J. P. J., Mangindaan, J. V., & Punuindoong, A. Y. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja karyawan di PT. Tirta investama Aqua Manado. *Productivity*, 5(3), 966–972. <https://share.google/zNr2FNZ8rDtV0qEng>
- Nurjanah, S. B., & Handayani, N. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada PT Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center). *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 2(1), 18–32. <https://share.google/TWtffrApMO2wxSTNw>
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 (2021). <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf>
- Porta, R. La, Silanes, F. L.-, & Shleifer, A. (1998). *CORPORATE OWNERSHIP AROUND THE WORLD*. <https://share.google/W1nxLPfDHZ7gZUcR>
- Salinan Otoritas Jasa Keuangan 3 /POJK.05/2017, Pub. L. No. 3 (2017). <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik-bagi-Lembaga-Penjamin/POJK-3-2017-Tata-Kelola-Lembaga-Penjamin.pdf>
- Sulistiyawati, A. I., Nugroho, A. H. D., & Saifudin Saifudin. (2024). *Integritas Keuangan Dan Mekanisme Good Corporate Governance* (R. B. R. Ishmatuka, T. Fatimah, & A. Budiyanto (Eds.)). Universitas Semarang Press (USM Press). [https://www.researchgate.net/publication/380786919\\_Integritas\\_Keuangan\\_Dan\\_Mekanisme\\_Good\\_Corporate\\_Governance\\_Perspektif\\_Akuntansi](https://www.researchgate.net/publication/380786919_Integritas_Keuangan_Dan_Mekanisme_Good_Corporate_Governance_Perspektif_Akuntansi)